

Abstrak

Paska kekalahan dalam Perang Jawa dan dari Belgia (setelah tahun 1930), Pemerintah Belanda menerapkan *cultuur stelsel* (yang diterjemahkan dengan “tanam paksa”) untuk menutup kerugian perang. Namun penerapan *cultuur stelsel* dianggap banyak merugikan rakyat. Pemerintah Belanda pun kemudian di awal tahun 1900 melakukan politik etis sebagai balas budi kepada rakyat. Dalam politik etis tersebut, Pemerintah Belanda melakukan pembangunan dalam bidang edukasi, irigasi, dan emigrasi. Terkhusus dalam bidang irigasi, Pemerintah Belanda membangun sarana prasarana irigasi berupa waduk-waduk serta parit-parit irigasi bagi rakyat. Jaringan irigasi tersebut untuk menyalurkan air dari sumbernya ke sawah-sawah serta perkebunan pada waktu itu. Dari sinilah mulai muncul kuasa atas mata air di Nusantara. Sumber-sumber air mulai dibangun bendungan dan saluran irigasi oleh Pemerintah Belanda untuk mengairi sawah dan kebun. Dan kuasa atas air ini berlanjut di masa kemerdekaan hingga sekarang, bagaimana Pemerintah memiliki kuasa untuk mengatur air dari sumber-sumber air kepada masyarakat. Seiring perkembangan jaman, ketika neoliberalisme muncul, pihak yang memiliki kuasa atas air bukan hanya pemerintah saja. Perusahaan swasta yang memproduksi air minum hadir sebagai pihak yang mengambil alih peran pemerintah dalam menata air minum.

Hadirnya sumber air yang besar di Klaten, menjadi daya tarik bagi pelaku kapitalis/perusahaan swasta untuk melakukan privatisasi sumber air. Pabrik Aqua yang dimiliki oleh Danoene merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan air minum dalam kemasan sejak tahun 2004 dari kawasan mata air Sigidhang. Oleh karenanya kawasan mata air Sigidhang merupakan tempat kontestasi beberapa aktor yang berjumpa dan membangun relasi kuasa. Dalam relasi kuasa tersebut muncul penerimaan serta perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlawanan terhadap kapitalisme ternyata memiliki akar yang cukup panjang di daerah Klaten. Dalam buku *Zaman Bergerak*, Takashi Shiraishi mengungkapkan bagaimana Haji Misbach pada tahun 1918 telah membangun gerakan perlawanan terhadap kapitalisme di daerah Delanggu. Perlawanan serupa terjadi pada saat ini di mana sebagian dari masyarakat melakukan gerakan perlawanan terhadap hadirnya pabrik Aqua Danoene yang melakukan privatisasi sumber air di Klaten.

Tesis ini menggunakan teori Pierre Bourdieu mengenai Arena, Modal, dan Habitus yang terjadi dalam relasi kuasa di mata air Sigidhang. Arena politik, ekonomi, dan media menjadi arena “permainan” para aktor. Pada masing-masing arena inilah, para aktor yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan pabrik Aqua melakukan kontestasi dengan modal yang mereka miliki. Kontestasi yang terjadi akan menciptakan relasi kuasa dan habitus terhadap para aktor di mata air Sigidhang dan sekitarnya.

Dalam kontestasi yang muncul akan ada aktor yang mendominasi “permainan” dengan kekuatan modal yang mereka miliki. Di samping itu juga akan ada aktor yang terdominasi karena modal mereka yang lemah. Melalui perebutan arena inilah kemudian terjadi proses internalisasi relaitas dan eksternalisasi internalitas. Para aktor bukan hanya terpengaruh oleh lingkungan, namun juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Demikianlah habitus hadir sebagai sebuah kebiasaan yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Habitus tak terlepas dari sejarah. Dalam konteks ini, Klaten tidak dapat dilepaskan dari perlawanan terhadap kapitalisme dan feodalisme. Bahkan di jaman Orde Baru, Klaten dijuluki sebagai daerah “merah” (sarang komunis). Di satu sisi Klaten merupakan tempat

berdirinya pabrik-pabrik besar. Namun di sisi yang lain, hadirnya kapitalisme juga memunculkan gerakan anti-kapitalisme. Sejarah panjang inilah yang membangun habitus perlawanan masyarakat di Klaten.

Pergerakan perlawanan satu abad lalu yang dikobarkan oleh Haji Misbach, terus berlanjut hingga saat ini, pada jaman ini. Jaman teruslah bergerak. Mereka yang terpinggirkan akan terus melakukan gerakan perlawanan terhadap para kapitalis.

Kata kunci : air, mata air, Sigedhang, Aqua, Bourdieu



Abstract

After the defeat in the Java War and from Belgium (after 1930), the Dutch government implemented *cultuur stelsel* (which translates as "tanam paksa") to cover war losses. However, the implementation of *cultuur stelsel* is considered to be detrimental to the people. Then, in the early 1900s, the Dutch government carried out ethical politics (*politik etis*) as a form of return to the people. In this ethical politics, the Dutch government carried out development in the fields of education, irrigation and emigration. Specifically in the irrigation sector, the Dutch Government built irrigation infrastructure in the form of reservoirs and irrigation ditches for the people. The irrigation network was to channel water from its source to rice fields and plantations at that time. From here the power over springs in the archipelago began to emerge. Water sources began to be built by dams and irrigation canals by the Dutch Government to irrigate rice fields and gardens. And this power over water continued during the independence era until now, how the Government has the power to regulate water from water sources to the community. As time progressed, when neoliberalism emerged, the party that had power over water was not just the government. Private companies that produce drinking water are present as parties that take over the government's role in managing drinking water.

The presence of large water sources in Klaten has become an attraction for capitalists/private companies to privatize water sources. The Aqua Factory owned by Danoene is the largest company in Indonesia that has produced and distributed bottled drinking water since 2004 from the Sighedhang spring area. Therefore, the Sighedhang spring area is a place of contestation for several actors who meet and build power relations. In these power relations, acceptance and resistance by the community emerge.

Resistance to capitalism apparently has quite long roots in the Klaten area. In the book *Moving Times*, Takashi Shiraishi reveals how Haji Misbach in 1918 built a resistance movement against capitalism in the Delanggu area. Similar resistance is currently occurring where some members of the community are carrying out resistance movements against the presence of the Aqua Danoene factory which is privatizing water sources in Klaten.

This thesis uses Pierre Bourdieu's theory regarding Arena, Capital and Habitus which occur in power relations in the Sighedhang spring. The political, economic and media arenas become the actors' "game" arenas. In each of these arenas, actors consisting of the government, society and the Aqua factory contest with the capital they have. The contestation that occurs will create power relations and habitus for the actors in the Sighedhang spring and its surroundings.

In the contestation that emerges there will be actors who dominate the "game" with the power of capital they have. Apart from that, there will also be actors who are dominated because their capital is weak. It is through the struggle for this arena that the process of internalizing reality and externalizing internality occurs. Actors are not only influenced by the environment, but also have an influence on the environment. Thus habitus exists as a habit that mutually influences one another.

Habitus cannot be separated from history. In this context, Klaten cannot be separated from its resistance to capitalism and feudalism. Even during the New Order era, Klaten was nicknamed a "red" area (a nest for communists). On the one hand, Klaten is where large

factories are located. But on the other hand, the presence of capitalism also gave rise to anti-capitalism movements. This long history has built a habitus of community resistance in Klaten.

The resistance movement a century ago that was instigated by Haji Misbach, continues to this day, in this era. Time keeps moving. Those who are marginalized will continue to carry out resistance movements against the capitalists.

Keywords : water, spring, Sigedhang, Aqua, Bourdieu

